PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN SERTA ORANG DI LAPAS KLAS I CIPINANG

Waryono, Nurlily Darwis, Lasmauli Noverita
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Abstract

“Lembaga Pemasyarakatan” (abbreviated as “Lapas”) is a place for rehabilitation of prisoners and juvenile offenders in Indonesia. Before the term “Lapas” was used, such places were referred to as “penjara” (prisons). Supervision in Lapas is carried out both inside and outside the facility, following operational standards set by Law No. 22 of 2022. The supervision includes monitoring vehicles and individuals entering and leaving the correctional institution, as well as inspections conducted by prison officers.

In this study, we will discuss the supervision and inspections at Lapas Class I Cipinang. The supervision and inspections at Lapas Class I Cipinang are carried out by Wasrik officers and p2u officers with the aim of reducing security and order disturbances and creating a safe and conducive environment. Officers monitor vehicles entering and leaving the prison, meticulously checking the completeness of shipping documents, driver identities, and the contents of the vehicles. For individuals entering or leaving the prison, inspections are conducted related to their identities and purposes. The process of supervision and inspections is documented in an activity report book filled out by the officers. To enhance and facilitate supervision, tools such as CCTV, Handy Talkies, and other communication devices are used. Reports on supervision and inspections are submitted to the platoon commander and are known to the Head of Prison Security Unit and the Prison Director.

Keywords: Law No. 22 of 2022, Prison Supervision.

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak dipemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Pengawasan di Lapas dilaksanakan di dalam dan di luar lapas sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan yang mengacu pada UU No 22 Tahun 2022. Pengawasan yang dilaksanakan terkait dengan pengawasan kendaraan dan orang yang masuk dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan serta pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas lapas. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengawasan dan pemeriksaan di Lapas Klas I Cipinang. Pengawasan dan pemeriksaan di Lapas Klas I Cipinang dilaksanakan oleh petugas Wasrik dan petugas p2u dengan tujuan untuk mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas adalah pengawasan terhadap kendaraan dan orang yang masuk dan keluar lapas. Kendaraan yang masuk dan keluar lapas diperiksa dengan seksama terkait dengan kelengkapan surat pengiriman barang, identitas supir dan isi dari kendaraan. Sedangkan untuk orang yang keluar masuk lapas perlu dilakukan pemeriksaan terkait identitas, dan keperluannya. Dalam proses pengawasan dan pemeriksaan di tulis dalam buku laporan kegiatan yang diisi oleh petugas. Untuk memperkuat dan memudahkan proses pengawasan dibantu oleh CCTV, Handy Talkie, dan alat komunikasi lainnya. Dalam proses pengawasan dan pemeriksaan dilaporkan kepada komandan pleton, dan diketahui oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas dan Kepala Lapas

Katakunci: UU No. 22 Tahun 2022, Pengawasan Lapas

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan berbagai pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa disebut narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang

menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas.

Sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 periode (Dirjen Pemasyarakatan), yaitu:

1. Periode(1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2. Periode(1966-1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

3. Periode(1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.

Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang Bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria. Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap (Dirjen pemasyarakatan, 1983) yaitu :

1. Tahap pidana hilang kemerdekaan (1872-1945) Tujuan dari tahap ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.

2. Tahap pembinaan kepada narapidana (Tahun 1945-1963)

Tahap ini bertujuan membina narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat.

3. Tahap Pembinaan Kepada Masyarakat (Tahun 1963-sekarang)

Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar penjaraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan. Istilah Pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Dr. SAHARDJO Menteri Kehakiman saat itu pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara.

Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kata dari kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan yang dilakukan terhadap para pelanggar hukum, serta sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan di Tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin optimal.

Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berkembang secara dinamis sesuai perubahan zaman membutuhkan perluasan peran. Melalui pengesahan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka fungsi dan tanggung jawab Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pola perlakuan bagi Tahanan, Anak, dan Warga binaan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi semakin kuat dan kokoh.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana memiliki arti yaitu perbuatan jahat atau kriminalitas. Kejahatan merupakan sebuah perilaku yang tidak relevan dengan nilai dan norma berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, perbuatan jahat atau sifat yang jahat.

Perkembangan perlakuan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan.

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu:

1. Teory absolute atau teori pembalasan Menurut teori ini bahwa membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana.
2. Teory relative atau teori tujuan Menurut teori ini bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti suatu pidana. Penjatuhan pidana tidak cukup hanya dengan suatu kejahatan melainkan harus dipikirkan manfaatnya dari pidana itu bagi masyarakat atau bagi si penjahat. Dasar pemidanaan dalam teori ini adalah mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan pemidanaannya adalah mencegah atau menghindarkan (prevensi) dilakukannya atau pelanggaran hukum. Sifat prevensi itu sendiri terdiri dari prevensi umum yaitu jika seseorang mengetahui terlebih dahulu bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan kejahatan maka ia akan lebih berhati-hati. Sedangkan menurut prevensi khusus adalah menahan niat buruk pembuat, menahan pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakan.
3. Teori penggabungan Teori penggabungan muncul dikarenakan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori-teori relatif. Menurut teori ini bahwa pidana hendaknya berdasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, tidak hanya saja mempertimbangkan masa lalu (terdapat dalam teori pembalasan) tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa yang akan datang (yang dimaksud pada teori tujuan), dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan bagi si hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat. Jadi, harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak narapidana dan di sisi lain petugas harus dapat melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum. Saat ini, seiring dengan era reformasi, wacana hak asasi manusia begitu gencarnya ditegakkan, baik itu dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Praktisi hukum, bahkan sampai pada masyarakat umum dengan penerapan program bernama keluarga sadar hukum (kadarkum).

Berdasarkan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis pidana, Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Macam pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

Pengertian pengawasan Menurut S.P Siagian (2004:40) Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemeriksaan Keamanan (Security Screening) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia, terdiri dari 4 (empat) sub-sistem peradilan pidana diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana yang sudah melakukan tindak pidana.

Dalam pasal 65 ayat 2 UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan di jelaskan bahwa petugas pemasyarakatan berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi dan tindakan pencegahan lainnya.

Dalam UU No 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat 21 dijelaskan Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.

Dengan adanya masalah kelebihan kapasitas narapidana di dalam lapas, tentunya hal ini akan berpengaruh dengan jumlah orang dan kendaraan yang keluar dan masuk lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentu saja dapat memicu ketidak amanan dan kurangnya pengawasan yang dapat berakibat merugikan Lembaga pemasyarakatan.

Tujuan diadakannya pengawasan adalah memastikan situasi aman, tertib dan kondusif di dalam dan sekitar area Lembaga Pemasyarakatan. Pengawasan pada Lembaga Pemasyarakatan di laksanakan di banyak area yaitu di dalam dan luar blok hunian.

Pos Pengawasan dan Pemeriksaan atau yang dikenal dengan Pos Wasrik merupakan pintu gerbang pertama keluar masuk Lapas. Pos Wasrik merupakan langkah pertama dalam strategi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan di area luar Lembaga Pemasyarakatan.

Adanya Pos Wasrik bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban terutama di areal luar Lapas Klas I Cipinang. Pos Wasrik adalah gerbang utama lalu lintas keluar masuknya orang maupun barang ke dan dari Lapas I Cipinang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 1995 dan Permenkumham nomor 33 tahun 2015 terkait Keamanan dan Ketertiban di Lapas maupun Rutan..

Petugas yang menjaga Pos Wasrik merupakan pegawai terpilih yang memiliki integritas tinggi sebagai garda terdepan dalam menjaga potensi gangguan kamtib dari luar Lapas. Selain itu petugas Pos Wasrik juga dibekali kemampuan komunikasi yang baik. Sebab mereka merupakan pemberi informasi pertama kepada tamu maupun pengunjung yang datang ke Lapas Klas I Cipinang.

Jumlah serta kepentingan orang dan kendaraan yang memasuki area lapas harus di sortir oleh petugas pos wasrik, serta orang dan kendaraan yang keluar dan masuk harus dilakukan pengecekan secara teliti dan menyeluruh. Hal ini untuk meminimalisir adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat memicu kericuhan serta berpotensi terjadinya pelarian narapidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung data sekunder yakni dengan cara meneliti buku-buku serta norma-norma

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hokum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan Undang-Undang (statue approach) Pendekatan Undang – Undang (statue approach) adalah pendekatan dengan undang undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research) berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan pemberian hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan penelitian lapangan (Field Research) yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dari jenis penelitian ini, peneliti berangkat ke lapangan secara langsung untuk mengadakan pengamatan langsung mengenai suatu peristiwa yang terjadi serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang akan masuk dan keluar area Lapas Kelas I Cipinang. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan atau studi di Lapas Kelas I Cipinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kendaraan Serta Orang di Lapas Klas I Cipinang

Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan serta orang di atur dalam UU No 22 Tahun 2022 pada pasal 65 ayat 2 sebagai Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada rutan maupun lapas. Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi:

- a. Pemeriksaan pintu masuk;
- b. Penjagaan;
- c. Pengawalan;
- d. Penggeledahan;
- e. Inpeksi;
- f. Kontrol;
- g. Kegiatan Intelijen;
- h. Pengendalian peralatan;
- i. Pengawasan komunikasi;
- j. Pengendalian lingkungan;
- k. Penguncian;
- l. Penempatan dalam rangka Pengamanan;
- m. Investigasi dan reka ulang; dan

- n. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 33 Tahun 2015 pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 mengatur mengenai klasifikasi pengamanan yaitu :

- a. Pengamanan sangat tinggi;
- b. Pengamanan tinggi;
- c. Pengamanan menengah;
- d. Pengamanan rendah

Klasifikasi Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. pola bangunan dan b. pengawasan. Pelaksanaan klasifikasi Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, serta pengendalian
- b. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan, dan kegiatan pembinaan;
- c. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan; dan
- d. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan closed circuit television dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Pada pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 33 Tahun 2015 menjelaskan terkait dengan Pemeriksaan terhadap pintu masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap orang yang akan memasuki halaman Lapas atau Rutan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengamanan. Petugas pengamanan wajib memeriksa dengan detail dan mencocokkan terkait identitas dan orang yang ingin memasuki area lapas serta menanyakan keperluan orang yang memasuki area lapas.

Selain orang yang memiliki kepentingan, petugas pengamanan juga memeriksa setiap kendaraan yang masuk dan keluar dari lapas. Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara memeriksa surat jalan kendaraan, identitas supir dan barang bawaan yang akan masuk atau keluar lapas.

Jika dalam proses pengawasan dan pemeriksaan kendaraan dan orang di Lapas Kelas I Cipinang terdapat kendala, petugas pengamanan melaporkan kepada komandan jaga untuk dilakukan tindak lanjut.

Lapas klas I Cipinang beralamat di Jl. Bekasi Timur Raya No 8, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Lapas Klas Cipinang berdampingan dengan Rutan Klas I Cipinang, Lapas Klas IIA Narkotika dan Rumah Sakit Pengayoman. Lapas Klas I Cipinang

mempunyai luas lahan 2,7 Hektar dengan kapasitas menampung warga binaan 880 orang. Namun jumlah warga binaan per tanggal 15 Januari 2024 sejumlah 3444 orang. Dengan banyaknya jumlah warga binaan dibandingkan dengan daya tampung menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang menjadi sangat over kapasitas. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan tata tertib serta akibat yang paling fatal adalah pengawasan dan pemeriksaan di area luar lapas dilaksanakan di pos pengawasan dan pemeriksaan (Pos Wasrik). Pos wasrik di jaga oleh petugas pengamanan sesuai jadwal jaga. Terdapat 4 regu Jaga di Lapas Kelas I Cipinang yaitu Pleton I, II, III, dan IV. Jam kerja petugas pengamanan di bagi menjadi 3 Shift. Yaitu Shift Pagi dimulai dari jam 07.00 WIB - 13.00 WIB, Shift Siang 13.00 WIB – 19.00 Wib dan Shift Malam 19.00 WIB – 07.00 WIB. Setiap pergantian shift diadakan apel serah terima regu jaga guna mencocokkan jumlah warga binaan di dalam dan di luar lapas serta serah terima informasi penting.

Pengawasan area luar di lapas kelas I Cipinang bukan hanya di laksanakan di pos wasrik, melainkan juga di pos Menara. Dari pos Menara petugas dapat melihat situasi dari ketinggian kurang lebih 10 meter. Petugas pada pos Menara dilengkapi dengan handy talkie, senapan, buku laporan serta lonceng yang dapat dibunyikan jika terjadi bahaya atau sebagai penanda waspada.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan di dalam lapas dan luar lapas, masing-masing jabatan masing-masing memiliki tanggung jawab, Berikut adalah Standar Tugas Pengawasan pemeriksaan kendaraan dan orang pada lapas kelas I cipinang:

1. Komandan Pleton/Regu Pengamanan
 - a. Mengatur semua pegawai penjagaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Mengerjakan buku jaga;
 - c. Komandan regu memastikan sarana dan prasarana keamanan dalam kondisi baik meliputi senjata api, borgol, HT (handy Talky), senter, alat pemadam ringan, lonceng sebelum melaksanakan tugas;
 - d. Komandan regu bertanggung jawab atas kondisi di lapangan yang sesuai dengan aturan dan tata tertib serta mengkoordinir anggotanya baik di petugas pintu utama, petugas blok hunian serta petugas pos menara dalam tugas penyelenggaraan pengamanan;
 - e. Mencatat pembagian tugas, inventaris, instruksi-instruksi dan kejadian-kejadian yang terjadi;
 - f. Dalam hal ada kericuhan, mengambil Langkah-langkah pengamanan pertama dan segera lapor keatasan dan lain-lain instansi yang diperlukan;
 - g. Memeriksa dan meneliti semua izin keluar kantor pada waktu jam kerja bagi para pegawai;
 - h. Memeriksa dengan seteliti-telitinya, lingkungan, kamar-kamar dan halaman lingkungan kantor;
 - i. Komandan regu dalam menjalankan tugas, di bantu oleh seorang wakil komandan pleton/regu yang kalau perlu bisa di serahi sebagai tugas komandan pleton/regu. Penyerahan sebagai tugas komandan jaga oleh komandan jaga tersebut harus di catat dibuku jaga;
2. Petugas Blok Hunian
 - a. Melakukan penghitungan jumlah narapidana pada saat pergantian piket jaga;

- b. Memastikan petugas jaga blok hunian untuk mengunci blok hunian. Pagi: komandan pleton mengintruksikan agar seluruh petugas blok hunian membuka kunci secara bersamaan. Siang: pukul 12.30 wib seluruh narapidana wajib memasuki blok hunian, apabila ada narapidana yang tidak mengikuti apel harus di sertai dengan bon/surat izin dan langsung dikordinasikan dengan komandan pleton/regu. Sore: pukul 17.00 wib seluruh narapidana sudah berada di dalam blok huniannya masing-masing dan petugas blok hunian mengunci blok hunian, bagi narapidana yang melaksanakan ibadah sholat magrib agar nama-namanya di laporkan ke komandan pleton/regu;
 - c. Petugas blok hunian dilarang meninggalkan area blok hunian tempatnya bertugas;
3. Petugas Pos Menara
 - a. melakukan pergantian jaga pada pos Menara setiap 2 jam sekali;
 - b. petugas jaga pada pos Menara wajib melaporkan setiap kegiatan;
 - c. melaporkan setiap inventaris secara rinci beserta jumlahnya setiap melakukan pergantian piket jaga;
 - d. melaporkan setiap kondisi kepada komandan pleton/regu;
4. Pos Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik)
 - a. Serah Terima
 - petugas regu pengamanan sebelumnya dan petugas pengaman pengganti melakukan serah terima inventaris, tugas tanggung jawab penjagaan pintu gerbang utama.
 - petugas pengamanan sebelumnya menyampaikan informasi penting kepada petugas regu pengamanan pengganti.
 - petugas regu pengamanan sebelumnya dan petugas pengamanan regu pengganti membuat dan menandatangani berita acara serah terima.
 - b. Buka Dan Tutup Pintu
 - petugas membuka, menutup dan mengunci pintu gerbang utama sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
 - petugas membuka pintu masuk utama di luar jam yang telah ditentukan hanya untuk keperluan dinas.
 - c. Pemeriksaan Orang
 - petugas menanyakan keperluan orang yang akan masuk ke dalam lapas.
 - petugas meminta orang yang akan memasuki area halaman untuk menunjukan identitas berupa KTP, SIM, Kartu Pelajar dan Passport serta mencatatnya.
 - petugas mengarahkan orang sesuai dengan keperluannya.
 - petugas mengidentifikasi setiap orang yang akan keluar dari dalam lapas.
 - petugas memeriksa orang yang keluar pada malam hari atau di luar jam dinas.
 - d. Pemeriksaan Petugas
 - petugas menanyakan keperluan petugas (dari luar unit pelaksana teknis Lapas I Cipinang) yang akan masuk ke dalam lapas.
 - petugas melakukan pengeledahan.

- petugas mengingatkan petugas yang akan memasuki area lapas dan rutan untuk menipkan barang bawaannya di dalam loker atau tempat yang di sediakan.
 - petugas mengidentifikasi setiap petugas yang keluar dari dalam lapas dan rutan
 - petugas memeriksa petugas yang keluar pada malam hari atau di luar jam dinas.
- e. Pemeriksaan Narapidana dan Tahanan
- petugas menerima informasi terkait narapidana dan tahanan yang akan masuk dan keluar area lapas dan rutan.
 - petugas mencocokkan fisik dan identitas narapidana tahanan dengan kelengkapan dokumen dari kepala lapas dan rutan maupun instansi penegak hukum.
 - petugas melakukan pengeledahan.
 - petugas mencatat jumlah narapidana dan tahanan yang akan masuk dan keluar lapas,
 - petugas melakukan konfirmasi kepada karupam, kepala pengamanan dan kalapas saat ada narapidana dan tahanan yang dikeluarkan pada malam hari.
- f. Pemeriksaan Kendaraan
- petugas memeriksa kendaraan yang masuk ke dalam lapas.
 - petugas mencatat nomor kendaraan yang akan masuk kedalam lapas.
 - petugas menggeledah kendaraan dalam posisi kendaraan mati.
 - petugas menggeledah orang yang berada di dalam kendaraan dengan cara meminta turun dari kendaraan.
 - petugas mengidentifikasi kendaraan yang akan keluar lapas dan mencatat di buku laporan.
- g. Pemeriksaan Barang
- petugas menanyakan keperluan barang yang di bawa masuk dan keluar dalam lapas untuk kepentingan kunjungan atau dinas.
 - petugas meminta surat jalan membawa barang apabila barang yang dibawa masuk dan keluar lapas digunakan untuk kepentingan dinas.
 - petugas menggeledah barang
- h. Pelaporan
- petugas memberikan laporan secara berkala kepada karupam tentang situasi dan kondisi di pintu gerbang utama lapas.
 - petugas melaporkan situasi dan kondisi pintu masuk utama kepada karupam apabila ditemukan adanya kerusakan dan kecurigaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
 - petugas memberikan laporan seketika saat adanya gangguan keamanan dan ketertiban kepada karupam dan kepala pengamanan.
 - petugas membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas.

Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U)

- a. memastikan setiap orang ataupun barang yang melintas di area P2U wajib di priksa sesuai dengan SOP

- b. Memastikan seluruh barang atau makanan yang memasuki area P2U harus di sertai surat ijin yang di tanda tangani oleh Ka.KPLP
- c. Mewajibkan seluruh tamu dinas untuk dicek identitasnya dan diberikan kalung tamudinas serta di stemple.

Setiap harinya, kendaraan yang rutin masuk dan keluar area Lapas Kelas I Cipinang adalah kendaraan sebagai berikut:

1. Kendaraan pengangkut bahan makanan, masuk kedalam area lapas membawa bahan makanan untuk warga binaan. Mobil masuk kedalam area lapas setiap jam 03.00 WIB selama 15 menit.
2. Kendaraan truk pengangkut sampah, masuk kedalam area lapas untuk mengangkut sampah dari area lapas . Mobil masuk ke dalam area lapas setiap jam 08.00 WIB selama 15 menit
3. Kendaraan penyuplai barang koperasi, masuk kedalam area lapas untuk membawa kebutuhan sehari-hari warga binaan untuk di jual di dalam lapas. Mobil masuk ke dalam area lapas setiap jam 06.00 selama 30 menit.
4. Kendaraan Transpas, masuk kedalam lapas ketika terdapat proses mutasi masuk atau keluar dari Lapas Kelas I Cipinang.
5. Kendaraan Ambulance, masuk atau keluar lapas jika terdapat warga binaan yang sakit dan memerlukan perawatan diluar lapas

Setiap kendaraan diatas yang ingin masuk dan keluar harus selalu diperiksa dengan teliliti dan diperiksa identitas supir, penumpang,dan barang bawaan dan di tulis di buku laporan serta berkordinasi dengan komandan jaga.Untuk kendaaraan pegawai, tamu dinas, dan pengunjung dilarang memasuki area dalam lapas, kendaraan di parkir di tempat parkir yang telah di sediakan di area luar lapas.

Pada pos wasrik juga dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada pengunjung yang akan melakukan kunjungan kepada warga binaan. Pemeriksaan yang di lakukan oleh petugas wasrik adalah pemeriksaan identitas, dan memastikan pengunjung yang ingin melakukan kunjungan harus berpakaian sopan. Dilarang menggunakan celana atau rok diatas lutut, dilarang menggunakan pakaian yang tidak berlengan, tidak diperkenankan memakai topi,kaca mata hitam dan jaket. Para pengunjung juga tidak diperbolehkan membawa Handphone, Senjata Api dan Senjata Tajam, Rokok dan Korek Api.

Selanjutnya pemeriksaan terhadap orang atau pengunjung yang ingin masuk kedalam lapas adalah di area Pengamanan Pintu Utama (P2U). Orang atau pengunjung akan dilakukan pengeledahan badan dan barang pada area ini. Pengeledahan badan dilaksanakan dengan memeriksa dari kepala sampai kaki orang yang ingin masuk kedalam area lapas. Pemeriksaan badan menggunakan alat scan body, dan secara manual. Selanjutnya pemeriksaan dilakukan terhadap barang bawaan. Pemeriksaan terhadap barang bawaan menggunakan mesin X-ray dan jika ada yang mencurigakan akan dilakukan pengeledahan lebih lanjut secara manual.

Orang atau pengunjung yang sudah dilakukan pemeriksaan di area P2U maka akan diberikan kalung identitas sebagai pengganti kartu identitas asli yang di titipkan di P2U. Kemudian tangan

orang atau pengunjung akan di stempel sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan bukan narapidana Lapas Kelas I Cipinang.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dan Pemeriksaan Kendaraan Serta Orang Di Lapas Klas I Cipinang

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan serta orang di Lapas Klas I Cipinang terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Kurangnya petugas pengawasan dan pemeriksaan orang di Lapas Kelas I Cipinang. Sebagaimana diketahui bahwa hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia mengalami Kelebihan Kapasitas (Over Capacity). Hal ini menyebabkan tidak seimbangnya jumlah petugas pengamanan dibandingkan jumlah warga binaan yang ada sehingga dalam proses pengawasan dan pemeriksaan menjadi kurang maksimal. Petugas pengamanan pada situasi tertentu tidak hanya melakukan pengawasan di Lapas, namun terkadang melakukan pengawalan jika ada narapidana yang sakit atau kegiatan diluar lapas seperti kegiatan menyanyi, menari, pertunjukan theater ,dan lainnya. Tentu saja hal tersebut membuat jumlah petugas pengamanan yang ada menjadi berkurang dan kurang optimal.
2. Peralatan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan dan orang yang kurang memadai. Dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sejatinya perlu ditunjang dengan alat yang canggih dan memadai agar pengawasan dan pemeriksaan menjadi optimal, cepat dan tepat. Namun dalam proses pengawasan dan pemeriksaan di Lapas Klas I Cipinang terdapat beberapa alat penunjang pengawasan dan pemeriksaan yang kurang memadai. Diantaranya Handy Talkie (HT) yang menjadi sarana utama untuk berkomunikasi antara petugas satu dengan yang lainnya kurang responsive. Suara yang keluar dan masuk kurang terdengar dengan jelas atau tidak jernih yang menyebabkan komunikasi terkadang harus dilakukan lebih dari satu kali penyampaian. Kemudian jumlah HT kurang dan menyulitkan untuk melakukan koordinasi jika terjadi sesuatu. Mesin Xray dan Body Scanner terkadang tidak dapat dioperasikan dan memerlukan pemeliharaan lebih lanjut. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pengeledahan barang dan badan sehingga pengeledahan harus dilakukan secara manual.
3. Perlu ditambah peralatan pengamanan yang lebih baik sehingga proses pengawasan dan pemeriksaan menjadi lebih optimal , cepat dan tepat. Peralatan pengamanan yang dibutuhkan diantaranya adalah penambahan cctv, penambahan HT, penggantian senjata api yang sudah rusak.
4. Kurangnya kesadaran tamu dan pengantar barang untuk membuka kaca mobil ataupun kaca helm untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan awal.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemeriksaan Kendaraan dan Orang pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan serta orang di Lapas Kelas I Cipinang dilaksanakan di beberapa tempat yaitu di area pos pemeriksaan dan pengawasan (POS Wasrik), pos Menara, Pintu Pengamanan Utama, dan di blok hunian.
2. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan kendaraan dan orang di Lapas Kelas I Cipinang yaitu: Kurangnya petugas pemeriksaan dan pengawasan di Lapas Kelas I Cipinang, Kurangnya fasilitas peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

SARAN

1. Menambah petugas untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di Lapas Kelas I Cipinang.
2. Menambah fasilitas dan peralatan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan seperti HT, CCTV, Metal Detektor, memperbaiki Body Scanner, dan X-ray agar proses pengawasan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan maksimal.
3. Memberi pengetahuan atau edukasi kepada para pengguna layanan di Lapas Kelas I Cipinang dalam bentuk banner atau postingan di media sosial terkait peraturan dan tata tertib dalam memasuki area Lapas Kelas I Cipinang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fajar. Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta: PT.Puspita Pelajar, 2015.
- Johni. Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayu Media Publishing, 2005.
- Marzuki. Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- Mahrus. Ali, Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, 1983.
- Moleong. Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad. Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Nasution. Hilmi Ardani, "Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi," Seminar Nasional dan Call for Paper UIJ, Balitbang Hukum dan Ham, Kementerian Hukum dan HAM, 2020.

Poernomo. Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan, Liberty Yogyakarta, 1986.

Rodiyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017

Soewarno, Dasar-Dasar Pengawasan, Bogor: IPB Pers, 2006

Siagian, Sondang, Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Binarupa Aksara, 2004

Silalahi. Ulber, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Subagyo. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Supriyono. Bambang, Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012.

Usman. Husaini dkk, Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006.

Waluyo. Bambang, Pidana dan Pemidanaan, cetakan kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Kebijakan

Penyelenggaraan Keamanan, Pengawasan.

Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Penjelasan atas Pasal 30 PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan.